SP-23/KO.13/2026

SIARAN PERS

PERKUAT INDUSTRI BPR DI JAWA TENGAH, OJK SETUJUI PENGGABUNGAN PT BPR MULYO LUMINTU KE DALAM PT BPR DANARAKYAT SENTOSA

Semarang, 15 Oktober 2026. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyetujui Penggabungan PT BPR Mulyo Lumintu ke dalam PT BPR Danarakyat Sentosa sebagai bagian dari langkah konsolidasi industri perbankan yang berkelanjutan guna memperkuat permodalan, meningkatkan daya saing, dan memperkokoh ketahanan industri BPR dalam mendukung pembiayaan sektor riil, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Persetujuan tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-75/D.03/2026 tanggal 8 Oktober 2026 tentang Pemberian Izin Penggabungan PT Bank Perekonomian Rakyat Mulyo Lumintu ke dalam PT Bank Perekonomian Rakyat Danarakyat Sentosa, yang berkedudukan di Ruko Metro Square B-14 Jalan Mayjen Bambang Sugeng, Jarangan, Kelurahan Mertoyudan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah dan diserahkan kepada pengurus BPR pada Selasa (13/10).

Kepala OJK Provinsi Jawa Tengah, Hidayat Prabowo, menyampaikan bahwa penggabungan sejumlah BPR merupakan langkah strategis untuk memperkuat permodalan, tata kelola, dan kapasitas usaha BPR. Penguatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing BPR sekaligus memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat, terutama pelaku UMKM.

“Dengan kelembagaan yang semakin kuat, BPR diharapkan mampu menjalankan fungsi intermediasi secara lebih optimal dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Hidayat.

Persetujuan penggabungan tersebut diberikan setelah OJK melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap aspek permodalan, tata kelola, manajemen risiko, kinerja keuangan, kesiapan operasional, serta pelindungan konsumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan efektifnya kedua penggabungan tersebut, seluruh hak dan kewajiban BPR yang menggabungkan diri beralih kepada masing-masing entitas penerima penggabungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seluruh nasabah tetap dapat melakukan transaksi dan memperoleh layanan perbankan secara normal tanpa perubahan atas hak maupun kewajibannya.

OJK menjelaskan bahwa proses konsolidasi telah disiapkan dengan baik sehingga masyarakat dapat mengakses layanan sebagaimana biasa. OJK akan terus mendorong penguatan kelembagaan melalui kebijakan konsolidasi dan transformasi industri BPR guna mewujudkan industri yang sehat, tangguh, efisien, dan berdaya saing sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional.

****

Informasi lebih lanjut:
Plh. Kepala OJK Provinsi Jawa Tengah – Bambang Hermanto;
Telp. (024) 8600 3000.